

## OPTIMALISASI KERJASAMA *HEXA-HELIX* GUNA MENDUKUNG PENGAMANAN PEMILU

Bellen Anggara Pratama  
Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah Polri Lemdiklat Polri, Bandung, Lembang 40391  
e-mail: [bellenanggarapratama@gmail.com](mailto:bellenanggarapratama@gmail.com)

### Abstrak

Tulisan ini dilatarbelakangi adanya urgensi untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan menjelang Pemilu (pemilihan umum) 2024, mengingat sejumlah negara mengalami konflik pasca-pemilu. Meskipun demokrasi Indonesia cenderung berada dalam kondisi yang lebih baik, tantangan pengamanan pemilu semakin meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan kerjasama *hexa-helix*, yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas/NGO, media massa, serta agregator yaitu penyelenggara dan peserta pemilu yang diharapkan dapat meningkatkan sinergi dalam pengamanan pemilu 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analisis. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, studi literatur, dan analisis SWOT. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa interaksi antar unsur *hexa-helix* belum optimal, terutama interaksi dengan akademisi, dunia usaha, media massa, dan peserta pemilu. Hasil penelitian ini juga mengungkapkan bahwa Polres Ketapang memiliki peran sentral dalam mengkolaborasikan unsur *hexa-helix*, meskipun masih ada ditemukan kendala operasional dan perlu meningkatkan perannya sebagai regulator, fasilitator dan dinamisator.

**Kata kunci:** kolaborasi; *hexa-helix*; Polres Ketapang; Pemilu 2024

### Abstract

*This paper is motivated by the urgency of maintaining political stability and security leading up to the 2024 general elections, considering that several countries have experienced post-election conflicts. Although Indonesia's democracy tends to be better, the challenges of securing the 2024 general elections are increasing. This research aims to optimize hexa-helix collaboration, which involves the government, business sectors, academics, communities/NGOs, mass media, and aggregators, namely election organizers and participants to enhance synergy in securing the 2024 general elections. The research employs the descriptive-analytical method and data is collected through observations, interviews, literature reviews, and SWOT analysis. The results of the research indicate that the interactions among hexa-helix elements are not yet optimal, especially with academics, the business sectors, mass media, and election participants. It is also found out that Ketapang police resort has a central role in coordinating the hexa-helix elements, although there are operational challenges and a need to enhance their role as regulators, facilitators, and catalysts.*

**Keywords:** collaboration; *hexa-helix*; Ketapang Police Resort; 2024 general election

## Pendahuluan

Permintaan Presiden Joko Widodo yang disampaikan pada Rakornas (Rapat Koordinasi Nasional) Kepala Daerah dan Forkopimda se-Indonesia di SICC (Sentul International Convention Centre) pada awal tahun 2023 kepada seluruh jajarannya untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan menjelang pemilihan umum (Pemilu) tahun 2024 perlu mendapatkan perhatian serius dari segenap aparatur negara (<https://www.kominfo.go.id/content/detail/46918/presiden-buka-rakornas-kepala-daerah-dan-forkopimda-tahun-2023/0/berita>). Permintaan tersebut bukan tanpa alasan mengingat keberadaan sejumlah negara yang terjerumus ke dalam konflik berkepanjangan pasca pemilu di negara mereka masing-masing. Sebagai contoh, pemilu yang dilaksanakan pada tahun 2018 di negara-negara Venezuela, Pakistan, Kongo dan Zimbabwe berakhir dengan konflik yang menimbulkan instabilitas di negara-negara tersebut (<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190521112908-106-396803/lima-negara-ricuh-karena-sengketa-pemilu>). Pemilu di Afghanistan tahun 2014 bahkan lebih buruk lagi karena berujung kepada perang saudara berkepanjangan.

Situasi kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) yang kondusif juga dapat mendukung transparansi sebuah pemilu karena ketika pemilu berlangsung dalam suasana yang aman, tertib, dan bebas dari konflik, masyarakat lebih cenderung percaya pada hasil pemilu dan institusi demokrasi yang terlibat. Walaupun masih diwarnai dengan berbagai permasalahan, kondisi demokrasi di Indonesia cenderung lebih baik. Namun demikian, kondisi tersebut tidak serta merta menjadikan tugas Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia) menjadi lebih mudah. Seiring dengan semakin dekatnya waktu penyelenggaraan Pemilu 2024, eskalasi ancaman dan gangguan kamtibmas dirasakan kian mengalami peningkatan akibat suhu politik yang semakin memanas.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) telah melakukan sebuah survei pada bulan Desember 2022 dan merilis hasil penelitian tersebut pada awal tahun 2023. Hasil-hasil survei ini menyebutkan bahwa tahun 2023 bisa menjadi sebuah masa atau tahun yang gelap akibat adanya berbagai ancaman (<https://www.antaranews.com/berita/3320757/survei-lpi-2023-akan-menjadi-tahun-yang-berat>). Dalam kesempatan itu, Boni Hargens yang dikenal sebagai Direktur Eksekutif LPI mengatakan:

Tahun 2023 menjadi tahun yang berat karena potensi krisis ekonomi dunia sebagai efek lanjutan perang Rusia-Ukraina, instabilitas pasar keuangan, dan meroketnya inflasi dunia, sehingga risiko stagflasi serta ancaman instabilitas nasional, seperti radikalisme, terorisme, dan separatisme Papua.

Situasi tersebut, sebagaimana yang diprediksi oleh hasil survei LPI, lebih diperparah lagi jika kita merujuk pada data gangguan-gangguan kamtibmas yang terjadi selama berlangsungnya Pemilu 2019. Pada durasi waktu tersebut, telah terjadi 55.582 kasus kriminal dalam berbagai bentuk, antara lain kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara dan kontinjensi yang ditemukan selama selama Operasi Mantap Brata. Pada Pemilu 2019 juga ditemukan fenomena baru, di mana sebanyak 894 orang anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) meninggal dunia karena alasan kesehatan (<https://news.republika.co.id/berita/rl4n80436/tragedi-gugurnya-ratusan-petugas-kpps-berpotensi-terulang-di-pemilu-2024>) dan ditambah 29 personel Polri gugur dalam melaksanakan tugas; penolakan hasil rekap berujung kerusuhan; polarisasi di tengah masyarakat yang sampai saat ini; politik identitas; berkembangnya *hoax* dan *hate speech*; fenomena *buzzer* dan *money*

*politics*; pelanggaran netralitas di kalangan ASN (Aparatur Sipil Negara) serta Aparatur Desa/Kelurahan khususnya saat pilkada serentak yang dilaksanakan antara tahun 2021 dan 2022, termasuk di daerah hukum Polres Ketapang.

Mengingat bahwa tantangan terhadap pengamanan Pemilu 2024 semakin tinggi, baik dalam hal eskalasi maupun kompleksitasnya sebagaimana dijelaskan dalam paragraf-paragraf sebelumnya, maka Polri dituntut untuk menjalin kerjasama dengan seluruh pihak, baik di internal kepolisian itu sendiri, bersama-sama dengan kementerian/lembaga pemerintah lainnya, penyelenggara pemilu maupun dengan unsur-unsur masyarakat sebagai subyek sekaligus obyek dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Salah satu model kerjasama tersebut adalah kerjasama *hexa-helix*. Model kerjasama *hexa-helix* ini menurut Stureson, Lindmark, dan Roos (2009) terdiri dari enam pemangku kepentingan, yaitu: pemerintah, dunia usaha, akademisi, organisasi non pemerintah, media massa dan *aggregator*, yaitu penyelenggara dan peserta pemilu. Keterlibatan yang lebih banyak dari *stakeholder* (pemangku kepentingan) dalam pengamanan Pemilu 2024 mengartikan lebih banyak sinergi di antara para pihak, termasuk pelaku atau peserta pemilu. Keberhasilan pengamanan Pemilu 2024 akan menciptakan suasana yang kondusif dan menjamin partisipasi aktif dari seluruh warga negara serta menjamin transparansi dan integritas dari hasil pemilu itu sendiri.

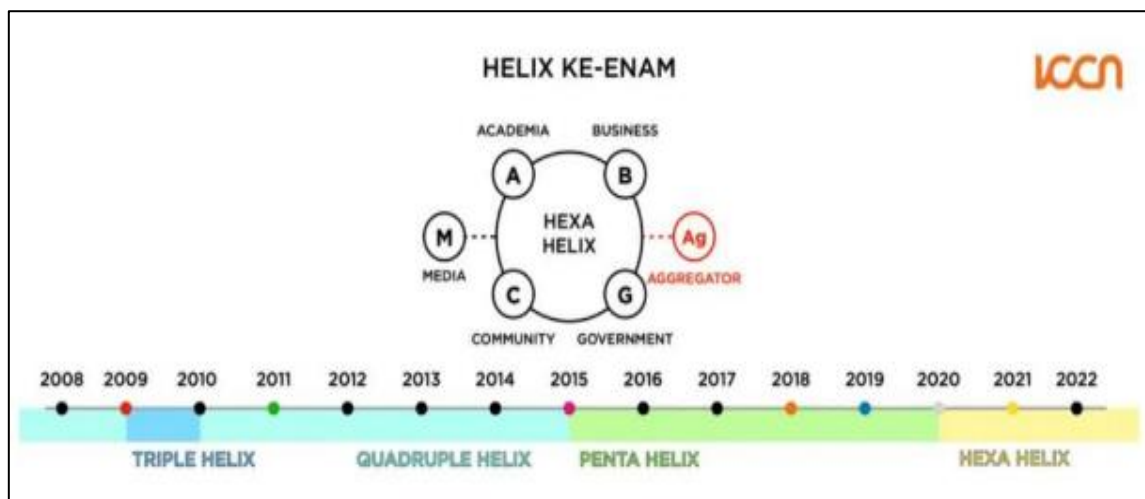
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diangkat dalam jurnal ini adalah bagaimana mengoptimalkan kerjasama *hexa-helix* yang dapat mendukung pengamanan Pemilu 2024. Sedangkan pokok-pokok persoalan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah (i) bagaimana interaksi antar unsur *hexa-helix* dalam mendukung pengamanan Pemilu 2024, dan (ii) bagaimana peran Polres Ketapang dalam mengkolaborasikan unsur *hexa-helix* dalam pengamanan Pemilu 2024?

Adapun ruang lingkup tulisan ini dibatasi pada upaya Kapolres Ketapang sebagai subyek penulisan dalam mengoptimalkan kerjasama *hexa-helix* berdasarkan teori kerjasama menurut Pamudji (1985) yang menjelaskan bahwa efektifitas kerjasama dipengaruhi oleh sumber daya yang memadai, peran masing-masing pihak untuk mencapai kepentingan bersama, serta interaksi dalam kerangka organisasi kerjasama. Analisis data diambil dari lokasi penelitian yaitu Polres Ketapang dan sumber-sumber lainnya yang berasal dari tahun 2020 sampai tahun 2022.

## Tinjauan Literatur

Kolaborasi menurut Camarihna-Matos dan Afsarmanesh (2008) adalah sebuah proses ketika beberapa entitas atau kelompok saling berbagi informasi, sumber daya, dan tanggung jawab atas sebuah program kegiatan yang dirancang, diimplementasikan, dan dievaluasi secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Sedangkan kolaborasi kelembagaan menurut Emerson, Nabatchi, & Balogh (2012) adalah proses dan struktur dari pengambilan keputusan kebijakan publik dan manajemen yang melibatkan masyarakat secara konstruktif antar badan badan publik, berbagai level pemerintahan dan atau pada ranah publik, privat dan sipil untuk melaksanakan suatu tujuan publik yang tidak dapat dicapai kecuali oleh forum bersama.

Seiring berjalannya waktu, bentuk kolaborasi kelembagaan mengalami perkembangan dari waktu ke waktu sebagaimana digambarkan dalam grafik berikut ini:



Sumber: Satari dan Larasati, 2021.

**Gambar 1. Perkembangan Bentuk Kolaborasi Kelembagaan**

Terkait perkembangan bentuk kolaborasi kelembagaan, maka berdasarkan Gambar 1 di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kolaborasi *Triple Helix* menurut Pahlevi (2017) dalam Haris Satria (2022: 9) adalah sebuah konsep yang mengacu pada kerjasama antara tiga aktor utama, yaitu pemerintah, swasta dan intelektual (tim ahli dari kalangan akademisi dan publik). Konsep ini menekankan pentingnya kolaborasi dan interaksi antara ketiga sektor tersebut dalam upaya meningkatkan inovasi, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan.
2. Kolaborasi *Quadra Helix* dengan penambahan unsur komunitas atau NGO (Non-Government Organization) atau LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), di mana NGO bisa mewakili kepentingan masyarakat, memfasilitasi dialog dan partisipasi publik, melakukan advokasi dan pemberdayaan, kolaborasi penelitian dan proyek atau ikut melakukan pengawasan (Haris Satria, 2022).
3. Kolaborasi *Penta Helix* dengan penambahan domain media massa yang memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan bersama dalam inovasi, pembangunan berkelanjutan, dan pertumbuhan ekonomi melalui pemberian informasi, mendorong partisipasi publik, advokasi kesadaran masyarakat, media pengawasan serta pendukung kolaborasi dan jaringan.
4. Model kerjasama *hexa-helix* menurut Stureson, Lindmark, dan Roos (2009) terdiri dari 6 (enam) pemangku kepentingan terdiri dari pemerintah, dunia usaha, akademisi, organisasi non pemerintah, media massa dan *aggregator*. Kolaborasi *hexa-helix* menambahkan unsur *aggregator* yang menurut Moghadam dan Moballeghi (2007) adalah menyatukan berbagai sumber daya yang berbeda yang sepertinya tidak saling berhubungan di dalam satu platform. Dalam Pemilu 2024, *aggregator* dapat disematkan kepada penyelenggara pemilu, yaitu KPU dan Bawaslu, dalam hal ini yaitu KPUD Ketapang dan Bawaslu Ketapang serta peserta pemilu termasuk partai politik dan masyarakat itu sendiri.

Sementara itu, model *Collaborative Governance* menurut Ansell dan Gash (2008) terdiri dari beberapa dimensi, yaitu sebagai berikut:

1. Konteks (*Context*) yang mencakup kondisi dan faktor-faktor yang membentuk latar belakang kolaborasi;
2. Aktor (*Actor*) yang berfokus pada individu, kelompok, atau organisasi yang terlibat dalam kolaborasi;
3. Proses (*Process*) yang menjelaskan bagaimana kolaborasi terjadi termasuk interaksi, komunikasi, dan negosiasi antara aktor-aktor yang terlibat; dan
4. Hasil (*Outcome*) yang berfokus pada dampak dan hasil yang dihasilkan dan mencakup keputusan yang diambil, kebijakan yang diimplementasikan, dan perubahan nyata dalam masyarakat.

Kolaborasi kelembagaan yang melibatkan kerjasama antara lembaga-lembaga yang berbeda memiliki urgensi yang signifikan dalam berbagai konteks. Banyak isu kontemporer yang dihadapi oleh masyarakat dan dunia saat ini sangat kompleks dan melibatkan berbagai aspek yang saling terkait. Tidak ada satu lembaga tunggal yang memiliki sumber daya, pengetahuan, atau keahlian yang cukup untuk mengatasi isu-isu ini secara efektif. Kolaborasi kelembagaan memungkinkan penggabungan sumber daya, keahlian, dan perspektif yang berbeda dari lembaga-lembaga yang terlibat, sehingga dapat menangani isu-isu tersebut dengan lebih holistik dan komprehensif. Melalui kolaborasi kelembagaan pula, lembaga-lembaga dapat memanfaatkan dan membagi sumber daya yang terbatas secara lebih efisien. Hal ini dapat mencakup berbagi infrastruktur, teknologi, keahlian, atau anggaran. Dengan melakukan kerjasama, lembaga-lembaga dapat mencapai lebih banyak hasil daripada jika mereka bekerja secara terpisah, karena dapat menghindari duplikasi dan memanfaatkan keunggulan masing-masing. Untuk itulah dalam banyak kesempatan baik Presiden, Wakil Presiden maupun Kapolri selalu menekankan mengenai pentingnya kolaborasi antar kelembagaan.

### Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analisis, yang diuraikan dengan menganalisa dan menggambarkan kondisi yang ada berdasarkan fakta dan data serta menggambarkan konsepsi yang mungkin dilakukan berkaitan dengan persoalan yang muncul khususnya terkait kerjasama *hexa-helix* guna mendukung pengamanan Pemilu 2024. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara secara langsung melalui saluran telepon kepada Kapolres dan Wakapolres Ketapang dan *video call* dan *sharing* opini terhadap subjek penelitian di Polres Ketapang serta digabungkan dengan studi empiris yang berasal dari pengalaman penulis selama bertugas di Polres Ketapang. Data-data juga diperoleh dari studi literatur terhadap bahan referensi berupa buku, jurnal, karya ilmiah, Lapsat, LAKIP, rekap pelanggaran, buku, internet dan lain sebagainya lainnya sedangkan proses analisis data/fakta dalam penelitian ini meliputi tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan sesuai pendapat B. Milles dan Huberman (2014).

Data dan fakta yang berhasil dikumpulkan kemudian dikelompokkan sesuai dengan aspeknya kemudian dipilih dan dianalisis menggunakan pendekatan analisis SWOT (Rangkuti, 2013) untuk menentukan dan memformulasikan strategi yang tepat dalam mengoptimalkan kerjasama *hexa-helix* guna mendukung pengamanan Pemilu 2024.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Kondisi Umum Situasi Kamtibmas Menjelang Pemilu

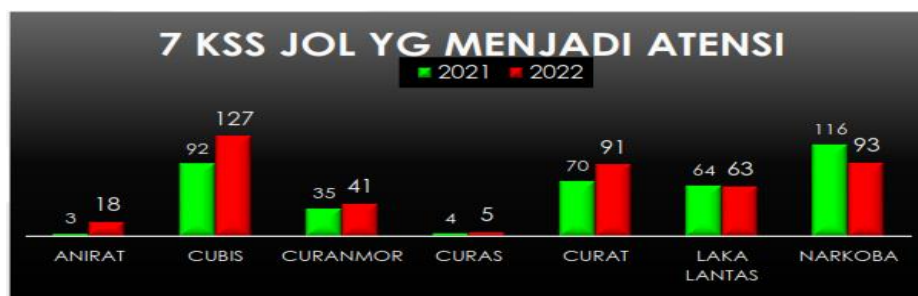
Untuk memberi gambaran yang lebih jelas mengenai situasi keamanan dan ketertiban Masyarakat, atau seringkali disebut kamtibmas di Polres Ketapang, terlebih dahulu perlu dijelaskan mengenai penyelesaian perkara agar dapat memberi gambaran yang lebih komprehensif. Adapun jumlah tindak pidana yang terjadi di Polres Ketapang akan digambarkan pada Tabel 1 di bawah ini:

**Tabel 1. Data Kriminalitas dan Penyelesaiannya**

| NO | JENIS KEJAHATAN      | TAHUN 2020 |     | TAHUN 2021 |     | TAHUN 2022 |     |
|----|----------------------|------------|-----|------------|-----|------------|-----|
|    |                      | L          | S   | L          | S   | L          | S   |
| 1  | KJHT KONVESIONAL     | 437        | 334 | 398        | 336 | 418        | 335 |
| 2  | KJHT TRANS NASIONAL  |            |     |            |     |            |     |
| 3  | KEJAHATAN KONTIJENSI | 0          | 0   | 0          | 0   | 0          | 0   |
| 4  | KJHTYG RUGI NEGARA   | 58         | 51  | 60         | 51  | 59         | 51  |
|    | JUMLAH               | 419        | 477 | 535        | 455 | 553        | 443 |

Sumber: Satreskrim Polres Ketapang, 2022.

**Tabel 2. Data Kriminalitas Menonjol**



Sumber: Satreskrim Polres Ketapang, 2022.

Berdasarkan Tabel 1 dan Tabel 2 di atas, diketahui bahwa baik tindak kriminal umum maupun kejahatan yang menonjol yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Ketapang masih menunjukkan angka yang cukup tinggi untuk kejahatan cubis, curat dan narkoba sebagai bentuk kriminalitas yang paling banyak terjadi. Data tersebut juga memperlihatkan bahwa tingkat kriminalitas yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Ketapang senantiasa mengalami fluktuasi namun masih cukup tinggi.

Selain dari aspek kriminalitas, indeks keamanan menurut Chrysnanda (2023: 136) dapat dilihat dalam bidang politik, antara lain:

1. Pemilu dan pilkada dapat terselenggara pada setiap tahapannya tanpa konflik fisik maupun pertumpahan darah;
2. Pejabat-pejabat politik mampu menjadi ikon dan mampu mencegah terjadinya konflik politik;
3. Masyarakat mempunyai ketahanan terhadap issue- issue politik; dan
4. Terbebas dari berbagai kejahatan-kejahatan terorganisir yang mengganggu bidang perpolitikan (*white collar crime*).

Pemilu (pemilihan umum) merupakan salah satu instrumen penting dalam kehidupan demokrasi di era otonomi daerah saat ini. Pemilu bukan saja salah satu sarana untuk mewujudkan demokrasi tetapi sekaligus sarana dalam penyelenggaraan kehidupan demokrasi. Pemilu merupakan proses lanjut dari keinginan untuk memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia, di mana dengan pemilu akan memberi kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk terlibat dalam berbagai proses politik. Namun dalam pelaksanaan pemilu tersebut, seringkali masih diperumit dengan maraknya ketidakteraturan sosial yang berwujud gangguan kamtibmas.

Adapun prediksi gangguan kamtibmas dalam pelaksanaan pemilu serentak 2024, sesuai dengan hasil analisa dan evaluasi yang dilakukan sepanjang Operasi Mantap Brata dalam pengamanan pemilu 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3 : Potensi Kerawanan Pemilu 2024**

| Potensi Gangguan                                         | Ambang Gangguan                                               | Gangguan Nyata                                      |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1. Fanatisme SARA                                        | 1. Keterlambatan, penghadangan dan pencurian Logistik Pemilu; | 1. Money Politik;                                   |
| 2. Heterogen Penduduk;                                   | 2. Langgar Ijin Kampanye;                                     | 2. Unjuk Rasa;                                      |
| 3. Kesenjangan Ekonomi;                                  | 3. Konvoi / arak – arakan, Mobilisasi Massa,;                 | 3. Pemalsuan Data; Sabotase;                        |
| 4. Pemahaman sempit tentang Politik;                     | 4. Unjuk rasa Hujat dan Provokasi;                            | 4. Hoax, Hatespeech, Black Campaign                 |
| 5. Radikalisme                                           | 5. Manipulasi data dan hasil pemilu;                          | 5. Intimidasi / ancaman;                            |
| 6. Kurangnya Sosialisasi tentang penyelenggaraan Pemilu. | 6. Protes Calon yang gagal.                                   | 6. Penganiayaan dan Bentrok antar pendukung;        |
| 7. Radikalisme                                           | 7. Intoleransi                                                | 7. Teror, Provokasi, Sabotas, Intimidasi / Ancaman; |
|                                                          | 8. Golput                                                     | 8. Mobilisasi massa Pro dan Kontra dan;             |
|                                                          |                                                               | 9. Pengrusakan, kekerasan atas nama agama           |
|                                                          |                                                               | 10. Tindak Pidana lainnya.                          |

Sumber: Laporan Infosus Satintelkam Polres Ketapang, 2023.

Berdasarkan hasil-hasil analisa dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemilu 2019, dapat digambarkan secara umum bahwa pemilu 2019 tersebut masih diwarnai adanya pelanggaran dan laporan kecurangan pemilu sebagaimana digambarkan pada Tabel 4 sebagai berikut:

**Tabel 4 : Penanganan Laporan Temuan Pada Pemilu 2019**

| SUB THP      | LAPORAN/TEMUAN | PEMBAHASAN       |                |             |            |
|--------------|----------------|------------------|----------------|-------------|------------|
|              |                | TIDAK DITERUSKAN |                |             | DITERUSKAN |
|              |                | TMS              | BKN TP. PEMILU | PMH LAINNYA |            |
| Pendaftaran  | 4              | 3                | 1              | -           | -          |
| Kampanye     | 15             | 11               | 1              | 2           | 1          |
| Penghitungan | 2              | 1                | 1              | -           | -          |
| Pelantikan   | 3              | 2                | 1              | -           | -          |
| JML          | 24             | 17               | 4              | 2           | 1          |

Sumber: Laporan Anev Pam Pemilu 2019. Polres Ketapang.

Berdasarkan Tabel 4 di atas, diketahui bahwa Polres Ketapang melalui Sentra Gakkumdu menerima 24 laporan pelanggaran maupun tindak pidana pemilu. Namun dari 24 laporan tersebut: 17 di antaranya tidak memenuhi syarat pelaporan; 4 kasus bukan tindak pidana pemilu; 2 kasus termasuk perbuatan melawan hukum lainnya; dan hanya ada 1 kasus yang diteruskan ke penyidikan.

## Kolaborasi Hexa-helix dalam Pengamanan Pemilu 2024 di Polres Ketapang

Berdasarkan jenis interaksinya, maka gambaran umum terkait kerjasama *hexa-helix* dapat digambarkan pada Tabel 5 sebagai berikut:

**Tabel 5. Data Interaksi antara Polres Ketapang dengan unsur *Hexa-helix* dalam Pengamanan Pemilu 2024**

| No | Unsur hexa-helix                                      | Jenis Interaksi |     |                            | Ket                                       |
|----|-------------------------------------------------------|-----------------|-----|----------------------------|-------------------------------------------|
|    |                                                       | Pertemuan       | MoU | Kegiatan Bersama           |                                           |
| 1  | Pemerintah (Pemkab, DPRD, Kodim, Kejaksaan, Ketua PN) | 5 kali          | 1   | 3 termasuk Kirab Pemilu    |                                           |
| 2  | Akademisi                                             | 1               | -   | -                          |                                           |
| 3  | Dunia Usaha                                           | -               | -   | -                          |                                           |
| 4  | NGO's/ LSM/ Ormas                                     | 6               | -   | 2                          |                                           |
| 5  | Media Massa                                           | 1               | -   | 7                          |                                           |
| 6  | Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu & DKPP)            | 13              | 2   | 4                          | Pengurus yang baru, dilantik 25 Juni 2023 |
| 7  | Peserta Pemilu (Partai, Calon dan Masyarakat Pemilih) | 2               | -   | 1 (Deklarasi Pemilu Damai) |                                           |

Sumber: Bagops Polres Ketapang, 2023

Berdasarkan data-data yang dimuat pada Tabel 5 di atas, terlihat bahwa interaksi antara Polres dengan unsur *hexa-helix* pada dasarnya sudah cukup baik, khususnya dengan lembaga-lembaga formal. Walaupun demikian, interaksi dengan unsur-unsur lainnya seperti akademisi, dunia usaha, media massa serta peserta pemilu termasuk partai politik, calon dan masyarakat pemilih masih cenderung belum optimal. Pembahasan terkait peran dan interaksi antar unsur *hexa-helix* dalam mendukung pengamanan Pemilu 2024 akan diuraikan sebagai berikut:

1. Unsur pemerintah termasuk Pemerintah Kabupaten, DPRD, Kodim, Kejaksaan dan Ketua Pengadilan Negeri—Unsur pemerintah memiliki peran sentral dalam pengamanan pemilu termasuk Pemkab (Pemerintah Kabupaten), DPRD, Kodim, Kejaksaan, dan Pengadilan Negeri. Pemkab berperan sebagai penanggung jawab pemilu di tingkat kabupaten, sementara DPRD mengawasi pelaksanaannya. Kodim membantu pengamanan melalui perbantuan kepada Polres. Kejaksaan bersama Polres melaksanakan penegakan hukum terkait pemilu sementara dan Pengadilan Negeri menangani sengketa dan gugatan yang terkait dengan hasil pemilu. Kerjasama di antara unsur pemerintah ini krusial untuk memastikan pemilu berjalan aman, adil, dan stabil. Namun dalam implementasinya terdapat catatan diantaranya:
  - a. Adanya potensi penggunaan program kerja dan sumber daya publik untuk keuntungan politik termasuk anggaran dan fasilitas pemerintah, untuk keuntungan politik calon atau partai tertentu.
  - b. Masih adanya isu netralitas ASN (Aparat Sipil Negara) dan konflik kepentingan mengingat bupati dan anggota DPRD adalah pengurus partai politik tertentu, di mana keterlibatan ini dapat mempengaruhi independensi mereka dalam melakukan tugas-tugas yang mendukung proses pemilu yang adil.

2. Unsur Dunia usaha—Dunia usaha dapat berperan sebagai sumber dana atau sponsor untuk mendukung kegiatan pengamanan pemilu. Namun demikian, masih terdapat risiko keterlibatan dunia usaha dalam pengamanan pemilu, di antaranya adalah politisasi dan keterlibatan aktif dari sebagian pengusaha dalam mendukung atau mendanai calon atau partai tertentu dapat mempengaruhi transparansi dan kemandirian pemilu, serta mengganggu persaingan yang adil di antara calon atau partai.
3. Unsur Akademisi—Universitas dan akademisi dapat melakukan riset dan analisis data terkait risiko keamanan. Disamping itu, universitas dan akademisi juga dapat berperan dalam menyebarkan informasi, advokasi dan kampanye sosialisasi anti *hoax*, polarisasi dan politik identitas, misalnya melalui acara *Ngobras* (ngobrol bareng santai) ataupun Podcast Pemilu Aman Demokratis. Adapun catatan terkait peran akademisi dalam pengamanan pemilu selain minimnya partisipasi, yaitu politisasi dan bias terkait hasil riset, penelitian atau survei yang mempengaruhi kredibilitas dan independensi mereka.
4. Unsur Organisasi Non Pemerintah termasuk LSM dan Ormas—LSM Pemantau Pemilu dan ormas keagamaan dapat berperan sebagai mediator dalam menangani potensi konflik atau perselisihan yang mungkin terjadi selama pemilu dengan membantu meredakan ketegangan dan mencari solusi damai dalam menangani perbedaan pendapat atau sengketa yang terkait dengan pemilu serta edukasi kontra *hoax*. Adapun tantangan yang selama ini masih dicari solusinya adalah keterbatasan sumber daya, seperti anggaran, personel, dan akses informasi yang memadai yang mempengaruhi kemampuan unsur NGO dalam mendukung pengamanan pemilu.
5. Unsur Media Massa—Media massa berperan dalam menyebarkan informasi terkait pengamanan pemilu, termasuk informasi mengenai regulasi pemilu, edukasi kesadaran menjaga kondisi aman dan damai, informasi tata cara pelaporan gangguan keamanan dan pelanggaran pemilu serta sebagai media informasi terpercaya yang bebas dari *hoax*. Sedangkan tantangannya adalah:
  - a. masih ada media yang mengejar *rating*, perhatian dan popularitas sehingga media-media tersebut sering menyajikan berita dengan sensasional yang cenderung tidak substantif, bahkan merupakan pengalihan isu penting;
  - b. media juga berpotensi digunakan sebagai alat untuk *spin issue* dengan memanipulasi opini dan pandangan masyarakat terhadap calon atau isu-isu pemilu tertentu; dan
  - c. media digital rentan terhadap serangan siber dan tindakan keamanan digital lainnya yang dapat mengganggu proses pemilu melalui penyebaran berita palsu melalui *platform* media sosial.
6. Unsur *aggregator*—KPU (Komisi Pemilihan Umum Daerah) bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pemilu secara transparan, adil, dan jujur. Sedangkan Bawaslu berperan melakukan pengawasan untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran dan kecurangan. Adapun tantangannya adalah adanya ketidakmampuan teknis KPU dalam mengatur, mengorganisir, dan mengawasi pemilu apalagi pengurus KPU baru dilantik tanggal 25 Juni 2023 dan dari lima orang anggota KPU Kabupaten Ketapang hanya 1 orang yang merupakan anggota periode sebelumnya. Hal ini tidak jauh berbeda dengan tantangan Bawaslu yang merekrut para anggotanya yang di antaranya belum mempunyai kualifikasi sarjana hukum.

7. Unsur partai politik dan para calon kepala daerah dan legislator—Mereka memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan iklim politik yang kondusif dan menjamin kader dan simpatisan mereka untuk tetap menjunjung tinggi norma keamanan selama pemilu berlangsung dan menghindari retorika provokatif yang dapat memicu ketegangan selama pemilu. Adapun tantangan yang mereka hadapi adalah minimnya edukasi politik kepada pendukungnya. Politisasi SARA (Suku Agama dan Ras) yang sering kali mengangkat politik identitas dan isu-isu primordial masih dianggap sebagai sarana paling mudah dan murah untuk menggali dukungan serta karakter masyarakat yang temperamental, mudah tersulut serta cenderung menunjukkan fanatisme golongan terutama pada masa pemilu.

### Peran Polres Ketapang dalam Mengkolaborasikan unsur *Hexa-helix* dalam Pengamanan Pemilu 2024

Untuk menilai Peran Polres Ketapang dalam mengkolaborasikan unsur *hexa-helix* dalam pengamanan Pemilu 2024, terlebih dahulu Penulis menyampaikan keterangan tentang jumlah personel Polres Ketapang dengan spesifikasi pendidikannya sebagai berikut:

**Tabel 6. Data Personel**

| NO.    | PANGKAT  | JML | DIKUM |     |      |       |      | DIKBANG |      |     |     | KET. |
|--------|----------|-----|-------|-----|------|-------|------|---------|------|-----|-----|------|
|        |          |     | S2    | S1  | SLTA | D III | SLTP | SES-PIM | STIK | SIP | PAG |      |
| 1      | PAMEN    | 6   | 2     | 4   | -    | -     | -    | 1       |      |     |     |      |
| 2      | PAMA     | 65  | 2     | 11  | 49   | 3     | -    |         | 3    | 19  | 18  |      |
| 3      | BRIGADIR | 474 | 6     | 122 | 332  | 6     | 8    |         |      |     |     |      |
| 4      | PNS      | 12  | -     | 2   | 9    | 1     | -    |         |      |     |     |      |
| JUMLAH |          | 557 | 10    | 139 | 390  | 10    | 8    | 1       | 3    | 19  | 18  |      |

Sumber: BagSDM Polres Ketapang, 2022.

Data-data yang tertera pada Tabel 6 di atas menunjukkan bahwa jumlah personel yang berpendidikan sarjana atau magister baru berjumlah 149 orang atau sekitar 27% dari keseluruhan personel. Sedangkan di kalangan PJU (Pejabat Utama) dan Pa (Perwira) Polres diketahui bahwa dari 71 Pamen (Perwira menengah) dan Pama (Perwira pertama) baru 41 orang yang sudah mengikuti Dikbang (Pendidikan pengembangan), baik Sespimmen, STIK, SIP maupun Alih Golongan. Dari keseluruhan personel tersebut, hanya 2/3 dari seluruh personel yang akan dilibatkan dalam pengamanan Pemilu 2024 mendatang.

Terkait sarana dan prasarana, Polres Ketapang menggunakan sarana dan prasarana serta peralatan yang telah ada di Polres Ketapang (alut/ alsus) berupa perlengkapan organik, yang digunakan sesuai dengan kebutuhan operasi dan hakekat ancaman yang dihadapi. Sedangkan dari aspek anggaran, diketahui bahwa Polres Ketapang mendapatkan anggaran sebesar Rp. 1.227.895.000,- untuk pengamanan Pileg dan Pilres 2024 sebagaimana yang dijabarkan dalam Tabel 7 di bawah ini:

**Tabel 7. Data Anggaran Pengamanan Pemilu 2024**

| NO | URAIAN                                     | LIBAT KUAT | LAMA  | INDEKS  | JUMLAH               | KET |
|----|--------------------------------------------|------------|-------|---------|----------------------|-----|
|    | <b>GIAT PENGAMANAN PILEG &amp; PILPRES</b> |            |       |         |                      |     |
| 1  | LATPRA OPS (TFG/TWG)                       | 175 ORG    | 3 HR  |         | 91.425.000           |     |
| 2  | SISPAM KOTA                                | 175 ORG    | 1 HR  |         | 23.275.000           |     |
| 3  | GELAR PASUKAN                              | 175 ORG    | 1 HR  |         | 5.075.000            |     |
| 4  | SERPAS                                     | 40 ORG     | 2 PP  |         | 41.600.000           |     |
| 5  | MASA KAMPANYE PILEG/PILPRES                | 175 ORG    | 34 HR | 149.000 | 886.550.000          |     |
| 6  | DUK POSKO DAN PANEL DATA                   |            |       |         | 37.000.000           |     |
| 7  | BBM PEMILU                                 |            |       |         | 142.970.000          |     |
|    | <b>JUMLAH KESELURUHAN</b>                  |            |       |         | <b>1.227.895.000</b> |     |

Sumber: Bagops Polres Ketapang, 2023.

Secara umum, dukungan organisasi Polres Ketapang dalam pengamanan Pemilu 2024 sejatinya memang masih terbatas. Namun, jika melihat ke belakang, pada pelaksanaan pengamanan Pemilu 2019 yang lalu, melalui manajemen yang baik, bahkan sumber daya organisasi yang terbatas ternyata mereka dapat diberdayakan untuk mencapai tujuan terjaminnya keamanan pemilu. Dengan anggaran tambahan sebesar Rp. 1.227.895.000,- untuk pengamanan Pileg dan Pilres 2024, Polres Ketapang dapat meningkatkan profesionalisme pengamanan. Namun demikian, berdasarkan hasil wawancara dengan para PJU Polres Ketapang diketahui ada sejumlah kendala operasional sebagai berikut:

1. Kendala konsolidasi internal:
  - a. Masih kurangnya intensitas pelatihan dan peningkatan kapasitas sehingga sebagian personel kurang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang cukup untuk menghadapi tantangan dan situasi yang kompleks selama pemilu.
  - b. Sebagian anggota Polres Ketapang merupakan polisi muda yang baru lulus SPN (Sekolah Polisi Negara) dan ditempatkan dalam fungsi gakum (penegakan hukum) sehingga didapati masih ada kesenjangan (*gap*) antara kompetensi dan pengalaman dalam pengamanan pemilu. Adanya perbedaan usia anggota yang cukup beragam yang mempengaruhi daya adaptasi terhadap teknologi informasi yang digunakan dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
  - c. Polres Ketapang belum memiliki *Command Center*. Secara umum sebanyak 91,31% sarana prasarana milik Polres Ketapang berada dalam kondisi baik namun ada sejumlah ranmor (kendaraan bermotor) dan perangkat IT yang rusak yang mencapai angka 22,2% dan 15,5%.
2. Peran sebagai regulator yang diwujudkan dengan menyusun MoU (Memorandum of Understanding) dengan para *stakeholder*, yaitu sebanyak 1 MoU dengan unsur Kejaksanaan dalam pembentukan Sentra Gakkumdu serta 2 MoU dengan penyelenggara pemilu yaitu KPUD dan Bawaslu. Sedangkan catatan terkait peran Polres sebagai regulator antara lain sebagai berikut:
  - a. Kerjasama antara Polres Ketapang dengan unsur *hexa-helix* belum seluruhnya dibingkai dalam kerangka MoU dan dijabarkan dalam SOP kerjasama sehingga pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab (TWT) masih sering diwarnai saling lempar tanggung jawab.

- b. Belum optimalnya kemampuan menjalin kerjasama termasuk keterampilan *legal drafting* sehingga belum maksimal dalam menyusun poin-poin kerjasama dengan unsur *hexa-helix* lainnya.
    - c. Masih adanya ego sektoral dalam pengamanan pemilu karena menganggap bahwa pengamanan pemilu adalah ranah kewenangan kepolisian semata.
  3. Peran sebagai fasilitator—Sebagai fasilitator, Polres Ketapang menjalankan fungsi preemtif dengan memfasilitasi sejumlah unsur *hexa-helix* termasuk media massa, pelibatan TNI dan partisipasi masyarakat untuk mendukung terwujudnya sitkamtibmas (sistem keamanan dan ketertiban masyarakat) yang kondusif selama Pemilu 2024. Namun demikian masih terdapat catatan terkait peran Polres Ketapang sebagai fasilitator keamanan pemilu antara lain sebagai berikut:
    - a. Kurangnya peran Polres dalam memfasilitasi peserta pemilu khususnya para calon dan parpol pendukung dalam memberikan edukasi politik serta masih ada peserta pemilu yang melakukan politisasi SARA, mengangkat politik identitas dan isu-isu primordial.
    - b. Polres kurang berperan dalam memfasilitasi peran akademisi dan unsur NGO termasuk LSM pemantau pemilu serta ormas dalam mendukung pengamanan Pemilu 2024 untuk mengadvokasi, mengedukasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu.
    - c. Polres masih kurang optimal dalam memfasilitasi pembangunan SIPT (Sistem Informasi Pemilu Terpadu). Sekalipun penyelenggara pemilu, Pemda dan Polres pada dasarnya sudah memiliki perangkat IT, namun perangkat tersebut belum dilakukan sinkronisasi dan integrasi kepada seluruh unsur *hexa-helix* sehingga pertukaran informasi masih dilakukan secara manual.
  4. Peran sebagai Dinamisator—Sebagai dinamisator, Polres Ketapang berperan menggerakkan dan mendorong partisipasi para *stakeholder* dalam pengamanan pemilu, di antaranya dengan pelatihan bersama unsur sentra gakkumdu bagi penyidik Polres, anggota Bawaslu dan JPU serta Deklarasi Pemilu Damai dan Berintegritas. Adapun kondisi faktual terkait peran Polres sebagai dinamisator pengamanan Pemilu 2024 adalah sebagai berikut:
    - a. Polres belum optimal dalam mendorong pertukaran informasi yang efektif dengan unsur Kominda untuk mendeteksi berbagai potensi kerawanan pemilu.
    - b. Polres belum optimal dalam mendorong peran polsek dan bhabinkamtibmas dalam pembentukan dan pembinaan jaringan untuk mendukung pulbaket informasi oleh polsek sebagai basis deteksi dan penanganan potensi gangguan keamanan pemilu serta dalam mendorong pelaksanaan polmas pemilu dan kolaborasi 3 pilar kamtibmas di tingkat desa.
    - c. Masih kurangnya upaya Polres dalam mendorong partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pengamanan Pemilu 2024 baik secara konvensional melalui siskamling, patroli bersama dan giat sambang maupun secara *online* dengan melakukan *cyber patrol*, penyebaran infografis pemilu aman dan melaporkan berbagai pelanggaran dan tindak pidana Pemilu.

## Upaya Pemecahan Masalah

Upaya pemecahan masalah untuk mengoptimalkan kerjasama *hexa-helix* dalam mendukung pengamanan Pemilu 2024 memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan interaksi antar unsur *hexa-helix* yang sinergis dalam mendukung pengamanan Pemilu 2024.
2. Meningkatkan peran Polres Ketapang yang optimal dalam pengamanan Pemilu 2024.

Dalam mengimplementasikan upaya pemecahan masalah untuk mengoptimalkan kerjasama *hexa-helix* dalam mendukung pengamanan Pemilu 2024, mengacu pada regulasi peraturan perundang-undangan dan pedoman lain sebagai berikut:

1. Pancasila dan UUD 1945
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan perubahannya (UU No 7 tahun 2023)
4. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik atau Parpol
6. Perkap No. 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perkap No. 1 Tahun 2019 tentang Sistem, Manajemen dan Standar Keberhasilan Operasional Polri.
7. Perkap Nomor 12 tahun 2014 tentang Panduan-Penyusunan Kerjasama Polri
8. Program Prioritas Kapolri yaitu Transformasi Menuju Polri yang Presisi khususnya pada program Transformasi Organisasi dan Transformasi Operasional.
9. Rencana Kerja Polri 2023

Adapun implementasi strategi untuk mengoptimalkan kerjasama *hexa-helix* dalam mendukung pengamanan Pemilu 2024 adalah sebagai berikut:

### **1. Strategi meningkatkan interaksi antar unsur Hexa-helix yang sinergis dalam mendukung Pengamanan Pemilu 2024**

- a. Pemberdayaan dukungan unsur Pemerintah unsur FKPD kepada Polres dalam pengamanan Pemilu 2024

Sasarannya adalah meningkatnya dukungan unsur Pemerintah unsur FKPD kepada Polres dalam pengamanan Pemilu 2024. Program kerja yang dapat dilaksanakan untuk memberdayakan dukungan unsur Pemerintah unsur FKPD kepada Polres dalam pengamanan Pemilu 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan pertemuan rutin antara pimpinan Polres Ketapang dengan unsur FKPD Ketapang dan pimpinan daerah lainnya untuk membangun koordinasi yang efektif serta penyamaan persepsi dan pola tindak dalam pengamanan Pemilu 2024 dengan target terselenggaranya pertemuan dan koordinasi unsur FKPD secara rutin minimal sebulan sekali.
  - 2) Memastikan tersedianya dukungan SDM, anggaran dan sarana yang memadai secara kolaboratif untuk mendukung operasional dan kelancaran pengamanan Pemilu dengan target tersedianya SDM, anggaran dan sarpras yang memadai untuk pengamanan Pemilu.
- b. Peningkatan sinergisitas kerjasama Polres dengan penyelenggara Pemilu khususnya KPUD dan Bawaslu.

Sasarannya adalah meningkatnya sinergisitas kerjasama Polres dengan penyelenggara Pemilu khususnya KPUD dan Bawaslu. Program kerja yang dapat dilaksanakan untuk meningkatkan sinergisitas kerjasama Polres dengan penyelenggara Pemilu khususnya KPUD dan Bawaslu adalah sebagai berikut :

- 1) Koordinasi rutin antara pimpinan Polres, KPUD, dan Bawaslu untuk menjamin seluruh agenda Pemilu dapat terselenggara sesuai jadwal secara aman dengan target terlaksananya seluruh agenda Pemilu dapat terselenggara sesuai jadwal secara aman.
  - 2) Pelatihan bersama unsur sentra Gakkumdu bagi penyidik Polres, anggota Bawaslu dan JPU dengan target terbangunnya kesamaan persepsi dan pola tindak pada tiap anggota sentra Gakkumdu khususnya penyidik Polres, anggota Bawaslu dan Jaksa.
- c. Peningkatan peran Akademisi dan unsur NGO dalam mendukung pengamanan Pemilu 2024

Sasarannya adalah meningkatnya peran Akademisi dan unsur NGO dalam mendukung pengamanan Pemilu 2024 melalui kontribusi pemikiran, analisis, dan partisipasi aktif dalam upaya menjaga keamanan. Adapun program kerja yang dapat dilaksanakan untuk meningkatkan peran Akademisi dan unsur NGO dalam mendukung pengamanan Pemilu 2024 adalah sebagai berikut :

- 1) Program Selip Kamtibmas untuk menjaga keamanan Pemilu dalam setiap materi yang disampaikan oleh akademisi dan unsur NGO termasuk LSM dan Ormas keagamaan termasuk dalam kegiatan-kegiatan keagamaan (pengajian, khotbah dan lain sebagainya) dengan target pesan Kamtibmas diselipkan dalam setiap materi yang disampaikan unsur hexa-helix.
  - 2) Program Ngobras (ngobrol bareng santai) bersama NGO termasuk LSM dan Ormas keagamaan dan unsur Hexa-helix lainnya untuk berbagi pemikiran terkait langkah-langkah strategis dalam mendukung pengamanan Pemilu dengan target terlaksananya kegiatan Ngobras (ngobrol bareng santai) sebulan sekali
- d. Penguatan peran media massa dalam menjaga sitkamtibmas yang kondusif selama Pemilu 2024

Sasarannya adalah untuk meningkatnya peran media massa dalam menjaga sitkamtibmas yang kondusif selama Pemilu 2024 dengan memberikan informasi yang akurat, berimbang, dan bertanggung jawab. Program kerja yang dapat dilaksanakan untuk memperkuat peran media massa dalam menjaga sitkamtibmas yang kondusif selama Pemilu 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Seminar jurnalistik Pemilu bagi jurnalis dan wartawan media massa mengenai etika jurnalistik dan penanganan berita sensitif selama Pemilu dengan target seluruh media mengirimkan utusan untuk mengikuti pelatihan etika jurnalistik Pemilu.
- 2) Edukasi literasi hukum jurnalistik untuk meningkatkan kesadaran media massa tentang peran dan tanggung jawab media dalam menjaga keamanan Pemilu.
- 3) Media monitoring untuk memastikan informasi yang disampaikan tidak memicu konflik dan diseminasi berita hoax yang dapat meresahkan

masyarakat dengan target untuk menurunkan berita-berita yang bersifat provokatif atau hoax di media massa.

- e. Peningkatan peran peserta Pemilu dalam memberikan edukasi politik dan menolak politik identitas

Sasarannya adalah untuk meningkatnya peran peserta Pemilu dalam memberikan edukasi politik dan menolak politik identitas. Adapun program kerja yang dapat dilaksanakan untuk meningkatkan peran peserta Pemilu dalam memberikan edukasi politik dan menolak politik identitas adalah sebagai berikut:

- 1) Pelatihan kepemimpinan dan etika politik bagi calon dan kader Parpol tentang etika politik Pancasila dengan indikator 50% calon dan kader Parpol mengikuti pelatihan kepemimpinan dan etika politik.
- 2) Kerjasama edukasi politik yang berfokus pada pentingnya kontestasi Pemilu yang sehat dan adil, serta bahaya politik identitas bagi persatuan dan keutuhan bangsa dengan target minimnya insiden politisasi SARA dan isu primordial dalam kontestasi Pemilu.
- 3) Menyelenggarakan podcast Pemilu secara terpadu dengan unsur Hexa-helix untuk membangun pemahaman tentang pentingnya Pemilu yang aman, adil dan demokratis dengan target terlaksananya podcast Pemilu secara terpadu dengan unsur Hexa-helix setiap bulan.

## **2. Strategi meningkatkan peran Polres Ketapang yang optimal dalam Pengamanan Pemilu 2024.**

Strategi internal untuk meningkatkan peran Polres Ketapang yang optimal dalam Pengamanan Pemilu 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Analisa dan evaluasi hasil pengamanan Pemilu di masa lalu yang aman dan kondusif secara kolaboratif

Sasarannya adalah untuk menyusun strategi pengamanan pada Pemilu 2024 berdasarkan analisis hasil pengamanan Pemilu sebelumnya. Program kerja yang dapat dilaksanakan untuk meningkatkan analisa dan evaluasi hasil pengamanan Pemilu di masa lalu yang aman dan kondusif secara kolaboratif adalah sebagai berikut:

- 1) Pembentukan tim analisis yang terdiri dari perwakilan dari Polres, KPU, Bawaslu, akademisi, media dan Data Analyst profesional dengan indikator terbentuknya tim analisis dengan representasi lengkap dari berbagai instansi terkait.
  - 2) Pengumpulan data dan informasi keberhasilan, tantangan, dan kegagalan yang dihadapi selama proses Pemilu dengan target terkumpulnya data dan informasi lengkap untuk keperluan analisis.
  - 3) Perumusan rencana tindak lanjut dan pengembangan strategi dan taktik yang lebih efektif dalam menghadapi situasi Pemilu 2024 dengan target tersusunnya strategi pengamanan Pemilu 2024 yang lebih efektif dan adaptif.
- b. Pembinaan kompetensi personel dalam melaksanakan Pengamanan Pemilu 2024  
Sasarannya adalah untuk meningkatnya kompetensi personel Polres Ketapang dalam melaksanakan Pengamanan Pemilu 2024 secara profesional dan efektif.

Beberapa program kerja yang dapat dilaksanakan untuk membina kompetensi personel dalam melaksanakan Pengamanan Pemilu 2024 diantaranya adalah:

- 1) Pelatihan khusus bagi personel Polres Ketapang tentang teknik dan taktik pengamanan Pemilu, termasuk penanganan situasi kontinjensi dan potensi konflik dengan indikator terlaksananya pelatihan khusus pengamanan Pemilu bagi seluruh personel yang dilibatkan dalam pengamanan pemilu.
- 2) Simulasi pengamanan Pemilu secara berkala, guna meningkatkan kesiapan dan responsivitas personel dalam menghadapi dinamika situasional dengan indikator terwujudnya kesiapan dan kecepatan respon personel menghadapi dinamika di lapangan.

c. Peningkatan peran Polsek dan Bhabinkamtibmas dalam mendukung kerjasama pengamanan Pemilu 2024.

Sasarannya adalah untuk meningkatnya peran Polsek dan Bhabinkamtibmas dalam mensinergikan dukungan pengamanan Pemilu 2024. Program kerja yang dapat dilaksanakan untuk meningkatkan peran Polsek dan Bhabinkamtibmas dalam mendukung kerjasama pengamanan Pemilu 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Pembentukan dan pembinaan jaringan untuk mendukung pulbaket informasi oleh Polsek sebagai basis deteksi dan penanganan potensi gangguan keamanan Pemilu terdepan dengan indikator Terbentuk dan terbinanya jaringan informasi serta penambahan kontak person oleh Polsek dan Bhabinkamtibmas.
- 2) Penguatan Polmas Pemilu dengan melibatkan peran aktif dari masyarakat, termasuk tokoh masyarakat dan pemuda, dalam mendukung kegiatan pengamanan Pemilu dengan indikator meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan pengamanan Pemilu.
- 3) Pembinaan kolaborasi 3 pilar Kamtibmas di tingkat Desa dalam pengamanan Pemilu dengan indikator terlaksananya kegiatan pengamanan Pemilu 2024 di tingkat desa oleh Bhabinkamtibmas, Babinsa dan Kepala Desa.

d. Pemberdayaan teknologi informasi dalam mendukung pengamanan Pemilu 2024 oleh Polres Ketapang.

Sasarannya adalah meningkatnya dukungan teknologi informasi dalam pengamanan Pemilu 2024 untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan responsifitas pengamanan Pemilu. Adapun program kerja yang dapat dilaksanakan untuk memberdayakan teknologi informasi dalam mendukung pengamanan Pemilu 2024 oleh Polres Ketapang diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Pengembangan Sistem Informasi Pemilu Terintegrasi sebagai media pengumpulan, analisis, dan pelaporan data terkait Pemilu dengan target terbangunnya Sistem Informasi Pemilu terintegrasi di Polres Ketapang.
- 2) Penggunaan teknologi analisis data big data, kecerdasan buatan (AI), integrasi API/ Application Programming Interface Google Map untuk memonitor dan menganalisis situasi kamtibmas secara real-time dengan target meningkatnya pemanfaatan teknologi big data dan kecerdasan buatan dalam pengawasan keamanan Pemilu.

- 3) Kerjasama dengan dengan vendor teknologi terkait dan prodi Teknik Informatika untuk memastikan teknologi tepat guna dalam pengamanan Pemilu dengan target terjalannya kerjasama yang efektif dengan instansi teknologi terkait.
- e. Penjabaran MoU dalam SOP kerjasama berdasarkan Perkap Panduan Kerjasama Polri untuk memperjelas pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab (TWT) masing-masing unsur Hexa-helix.  
Sasarannya adalah meningkatnya kejelasan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab (TWT) masing-masing unsur Hexa-helix. Program kerja yang dapat dilaksanakan untuk memperjelas pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab (TWT) masing-masing unsur Hexa-helix adalah sebagai berikut:
  - 1) Konsultasi dan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah, akademisi, industri, masyarakat, dan media, untuk menyusun MoU yang mencerminkan kepentingan dari setiap unsur Hexa-helix dengan target terselesaikannya MoU sesuai Perkap Panduan Kerjasama Polri.
  - 2) Penyusunan SOP kerjasama berdasarkan MoU yang telah disepakati, yang memuat rincian tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing unsur Hexa-helix dengan target tersusunnya SOP kerjasama yang jelas dan terstruktur sehingga tidak terjadi tumpang tindih tugas, wewenang dan tanggung jawab.
  - 3) Diseminasi, sosialisasi dan audit kepatuhan terkait implementasi SOP kerjasama dengan tagret terlaksananya kerjasama yang terkoordinasi dengan baik sesuai dengan SOP yang telah disusun.

## Kesimpulan dan Saran

Interaksi antar unsur Hexa-helix dalam mendukung Pengamanan Pemilu 2024 pada dasarnya sudah berjalan baik dengan unsur pemerintah, Dunia usaha, Akademisi, Organisasi Non Pemerintah, Media Massa maupun aggregator termasuk Penyelenggara dan Peserta Pemilu dengan isu utama yaitu konflik kepentingan, minimnya partisipasi, politik identitas dan karakter masyarakat. Upaya pemcahan masalahnya diantaranya melalui penguatan peran media massa, peserta Pemilu, Akademisi dan unsur NGO, dukungan unsur Pemerintah serta penyelenggara Pemilu khususnya KPUD dan Panwaslu.

Peran Polres Ketapang dalam pengamanan Pemilu 2024 sudah cukup baik dan sesuai tupoksinya serta belum ditemukan adanya laporan isu netralitas maupun kurang profesional. Namun demikian masih terdapat sejumlah catatan terkait peran Polres sebagai regulator, fasilitator dan dinamisator kerjasama Hexa-helix diantaranya yaitu kerjasama belum dibingkai dalam MoU akibat keterbatasan keterampilan legal drafting, belum optimal dalam memfasilitasi peserta Pemilu, Akademisi dan unsur NGO dan pembangunan Sistem Informasi Pemilu Terpadu, pertukaran informasi, pembentukan dan pembinaan jaringan serta partisipasi masyarakat. Dengan demikian perlu dioptimalkan melalui Anev hasil pengamanan Pemilu, pemberdayaan teknologi informasi serta menjabarkan MoU dalam SOP kerjasama untuk memperjelas pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab (TWT) masing-masing unsur Hexa-helix.

Menyarankan kepada Kapolda Up Karoops untuk (1) menyegerakan pelatihan 13 kompetensi prioritas terkait dengan Pengamanan Pemilu, yaitu: Pelatihan penanganan Ujaran Kebencian (*hate speech*); Diskresi Kepolisian; Penanganan Konflik Sosial; PAM Pemilu; menembak; beladiri Polri; Polsek sebagai deteksi dini; penanganan radikalisme; PHH; Pengamanan VIP/VVIP; Jibom; Sistem Peradilan Penanganan Anak Serta Pengemudi VIP/VVIP; (2) mengembangkan Sistem Informasi Pemilu Terintegrasi sebagai media pengumpulan, analisis, dan pelaporan data terkait Pemilu yang didukung dengan teknologi analisis data big data, kecerdasan buatan (AI), integrasi API/ *Application Programming Interface* Google Map sehingga dapat memonitor dan menganalisis situasi kamtibmas secara real-time melalui pop-up notification; dan (3) menyelenggarakan Podcast Pemilu Aman Damai dan Demokratis, Program Ngobras dan Selip Kamtibmas di tingkat Polda dengan melibatkan seluruh unsur Hexa-helix sebagai nara sumber.

## Daftar Pustaka

- Ansell, C., & Gash, A. 2008. *Collaborative Governance in Theory and Practice*. Journal of Public Administration Research and Theory, 543-571.
- Camarihna-Matos, L.M. & Hamideh Afsarmanesh. 2008. *Concept of Collaboration*. USA: IGI Global.
- Chryshnanda DL. 2023. Jejak Dialog Peradaban. Bandung: Penerbit Sespim Polri
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. 2012. *An Integrative Framework For Collaborative Governance*. Journal of Public Administration Research and Theory, 1-29.
- Lindmark, A.; Stureson. E.; and Nilsson R. M. 2009. *Collaboration for Innovation - A Study in the Öresund Region*. Sweden: Lund University Libraries.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications. (Terjemahan. Jakarta: UI Press)
- Moghaddam, Golnessa Galyani & Moballeghi, Mostafa. 2007. *The Importance of Aggregators for Libraries in the Digital Era*. Diakses tanggal 4 Oktober 2023 dari [http://eprints.rclis.org/11331/1/The\\_Importance\\_of\\_Aggregators\\_for\\_Libraries\\_in\\_the\\_Digital%E2%80%A6pdf](http://eprints.rclis.org/11331/1/The_Importance_of_Aggregators_for_Libraries_in_the_Digital%E2%80%A6pdf)
- Pahlevi, A. S. 2017. Gagasan tentang pengembangan ekonomi kreatif nasional (studi pada potensi, peluang, dan tantangan ekonomi kreatif di kota Malang). Seminar Nasional Seni dan Desain, hlm 185-188.
- Rangkuti, Freddy. 2013. Teknik Membedah Kasus Bisnis Analisis SWOT Cara Perhitungan Bobot, Rating, dan OCAI. Penerbit PT. Gramedia Pustaka.
- Satari, F., Larasati, T., Putri, S. S., Shintia, I., Pempasa, I., Oktaviani, Y., Ramadhan, P., & Herawan, R. (2017). Indonesia Kreatif Animasi. In Bekraf. Badan Ekonomi Kreatif Indonesia.
- Satria, Haris. 2022. Pengembangan Kota Kreatif Berbasis Lingkungan Berkelanjutan. Jakarta: Jejak Pustaka.

## Internet

- <https://www.kominfo.go.id/content/detail/46918/presiden-buka-rakornas-kepala-daerah-dan-forkopimda-tahun-2023/0/berita>
- <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190521112908-106-396803/lima-negara-ricuh-karena-sengketa-pemilu>
- <https://www.antaranews.com/berita/3320757/survei-lpi-2023-akan-menjadi-tahun-yang-berat>
- <https://news.republika.co.id/berita/r14n80436/tragedi-gugurnya-ratusan-petugas-kpps-berpotensi-terulang-di-pemilu-2024>